

**Ali Usman, Ketua PATAKA**

## Strategi Kebijakan BAPANAS dalam Mewujudkan Kemandirian, Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Nasional

### DASAR PEMIKIRAN

Diskursus pemanfaatan sumber daya lokal dan isu strategis tata kelola pangan merupakan urusan badan pangan nasional (BAPANAS) untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Strategi kelembagaan tidak hanya mengelola distribusi untuk pemenuhan pangan di tingkat masyarakat sesuai amanat UU Pangan No.18/2012. Akan tetapi kelembagaan ini diharapkan mengurai benang kusut pengolahan pangan dengan kelembagaan pangan. Termasuk sinkronisasi aturan terkait, guna pemenuhan hak-hak atas pangan yang berdaulat dan berkeadilan.

### KAJIAN EMPIRIS

Pemerintah resmi membentuk BAPANAS melalui Perpres No. 66/2021, sebagai bentuk penguatan koordinasi antar sektor. Tugas BAPANAS, melaksanakan pemerintahan di bidang pangan berbasis pada UU No. 11/2021 tentang Cipta Kerja. Kekhawatiran muncul yaitu pembentukan BAPANAS bagian dari filosofi investasi pasar. Juga substansi UU tersebut menyetarakan antara produksi dalam negeri dan impor. Padahal UU Pangan No. 18/2012 dijelaskan tentang kemandirian pangan.

### REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Pemerintah harus segera melakukan penetapan ketua, anggota dan personil struktur organisasi. BAPANAS diharapkan *powerfull* dalam menangani pangan, menjamin dan mengatur ketersediaan pangan nasional pada 9 komoditi. Agar kementerian teknis lainnya tidak saling tarik-menarik mengambil kewenangan.
2. BAPANAS diharapkan memperkuat sistem informasi pangan agar persoalan data tidak terjadi tarik menarik oleh K/L. Kemudian perlu mengatur data konsumsi, data produksi dan data ketersediaan.
3. BAPANAS harus menetapkan harga di tingkat pasar, dan jangan sampai dikendalikan kementerian lain. Artinya kes-

ejahteraan petani harus dipertegas.

4. Komoditi ikan perlu dimasukkan program kerja BAPANAS. Karena kebutuhan akan protein hewani ikan sama pentingnya. Apabila tercemar pasokan kurang, maka akan mengganggu masyarakat di daerah kepulauan terutama di timur Indonesia.
5. Perum BULOG perlu didorong oleh BAPANAS menjadi pemain logistik termasuk melakukan ekspor. Karena besarnya status BUMN Pangan yang mengelola pangan juga menentukan ketahanan pangan.
6. BAPANAS diharapkan memiliki suatu sistem *blockchain* untuk mengendalikan rantai pasok 9 komoditas pangan strategis.
7. Pemerintah perlu mendorong BAPANAS agar ketika ingin mendiversifikasi suatu produk tidak lagi bekerjasama dengan Kementan namun Kementerian Perindustrian.
8. Pemerintah perlu secepatnya menentukan kejelasan fungsi dan tugas masing-masing *stakeholder* K/L di pemerintah. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan karena adanya BAPANAS. Justru kehadiran BAPANAS diharapkan dapat memperkuat sektor pangan yang sering muncul kendala mulai dari impor, produksi, data, dan sebagainya.
9. Koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan lintas sektoral pangan harus dilakukan dengan *job description* sesuai tugas dan kewenangan dengan mengabaikan ego sektoral kementerian/Lembaga.
10. Perlu *roadmap/blueprint* jangka panjang BAPANAS agar supaya proses tugas, fungsi dan kewenangan mulai dari perencanaan sampai pada tahap evaluasi. Terutama pada cadangan, stabilisasi pasokan dan harga, distribusi untuk pemenuhan pangan rakyat yang berkeadilan dan berkedaulatan.
11. Perlu ada database pangan (*one data one policy*) mulai dari perencanaan sampai tahap evaluasi kebijakan pangan.
12. Enam saran kepada BAPANAS. *Pertama*, menetapkan arah kebijakan dasar dari setiap komoditi. *Kedua*, mengubah sistem daur ulang persediaan dari stelsel pasif yang mengandalkan PSO atau *Captive Market* dengan stelsel aktif yang terintegrasi dengan skema komersial. *Ketiga*, mengembangkan sistem pengendalian cadangan berbasis digital (*blockchain*), tidak terbatas pada BUMN pangan. *Keempat*, mengintegrasikan seluruh sistem informasi terkait kerawanan pangan dan pemenuhan gizi. *Kelima*, mempercepat pertumbuhan industri diversifikasi pangan nasional. *Keenam*, mengintegrasikan sistem persediaan domestik ke rantai pasok global.